



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

## **HALAMAN VERIFIKASI**

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator  
Pada tanggal 14 Juni 2017

Koordinator Bidang Infrastruktur  
dan Ekonomi

Petugas Verifikator

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi  
NIP. 19710630 199803 1 005

WORO PRATIWI S, SP, M.Eng  
NIP. 19770531 200501 2 011

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023 198503 1 005

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun ketiga sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 2014 - 2018.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2018 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra, pagu indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Temanggung, 14 Juni 2017

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Ir. C.MASRIK AMIN ZUHDI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198703 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016 .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	39
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	43
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018.....	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	47
3.3. Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV. PENUTUP .....	50

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala OPD untuk menyiapkan Rencana Kerja OPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja OPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja OPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja OPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang berfungsi menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan OPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung. Rencana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Manusia berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

### **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2018 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I . PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berisikan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, RPJMD, Penyusunan APBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Berisikan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Berisikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian

#### Renstra OPD

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai 1) tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,



seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*); 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/ kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam rangka pelaksanaannya.

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

4.3. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2016 dan Capaian RENSTRA OPD**

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun 2016 pada bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan implementasi dari program dan kegiatan pada 3 SKPD yang sebelumnya terdiri atas :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Dintanbunhut) Kabupaten Temanggung
2. Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Temanggung
3. Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten Temanggung

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja tahun 2016 pada ketiga SKPD yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan capaian kinerja renstra Tahun 2016 rata-rata terserap 100% kecuali pada 2 indikator Ketahanan Pangan yaitu Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat dan Indikator Skor Pola Pangan Harapan baru tercapai 89,83% dan 94,53%.

Sedangkan target kinerja sasaran strategis meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan hanya mampu tercapai 96% karena terkendala cuaca Kemarau Basah (musim hujan yang terus menerus karena terjadinya La Nina sehingga mengakibatkan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan mengalami penurunan, misalnya Tembakau, Kopi Arabika, Kopi Robusta, jagung, ubi kayu, cabe, dan lain-lain.

Upaya untuk mencapai sasaran dan target kinerja sebagaimana disebutkan diatas adalah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, baik yang langsung ditujukan ke masyarakat secara langsung berupa program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program

Peningkatan Penerapan Tehnologi pertanian/Perkebunan, Program peningkatan pemasaran dan hasil produksi pertanian.

Pada urusan ketahanan pangan, pelaksanaan program dan kegiatan berupa program peningkatan Ketahanan pangan pertanian/perkebunan mencapai 98,44% serta pencapaian 10 indikator standar pelayanan Minimal urusan ketahanan pangan di kabupaten Temanggung yang telah mencapai 100% pada 8 indikator, sedangkan 2 indikator lainnya yaitu peningkatan cadangan pangan masyarakat mencapai 89,83% dan Indikator Skor Pola pangan harapan (SPPH) tercapai 94,53%.

Pada bidang SDM dan Kelembagaan Pertanian, capaian indikator kinerjanya mencapai 100%. walaupun demikian masih diperlukan bahan pendukung untuk pengambilan kebijakan, antara lain :

1. Data base pelaku dan sasaran pembangunan yang terus ter update.
2. Evaluasi pelaksanaan periode sebelumnya
3. Perkembangan global regional.

Database pelaku dan sasaran pembangunan diupdate melalui Aplikasi Simluhtan Kementerian Pertanian, yang memuat semua data Kelompok Tani, Gapoktan, Penyuluh THL, Penyuluh PNS di kabupaten Temanggung yang telah teregister.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Rencana Kerja Bapeluh sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target kumulasi di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Rencana Strategis Bapeluh Tahun 2014-2018. Evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar komparasi penetapan target Rencana Kerja Dintanpangan Tahun 2018.

Dengan melakukan Komparasi tersebut maka review atau telaahan atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dintanpangan tahun sebelumnya dan realisasi Rencana Strategis Dintanpangan dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dintanpangan dan/atau realisasi APBD untuk Dintanpangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 terkendala oleh :

1. Kegiatan yang bersifat bantuan hibah tidak terjadi pelaksanaan dikarenakan adanya pengurangan anggaran sehingga pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada petani terhambat.

Demikian juga pada ketahanan pangan, dikarenakan hibah lumbung pangan tidak ada, maka stimulant kepada masyarakat dalam hal penyediaan bahan cadangan pangan juga kurang optimal.

2. Terjadi perubahan iklim tahun 2016 yang dikarenakan efek La Nina sehingga terjadi kemarau basah hujan terus menerus sepanjang tahun sehingga menyebabkan produksi dan produktivitas pada komoditas Tembakau menurun tajam, terjadinya peningkatan serangan hama penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pembangunan infrastuktur (jaringan irigasi dan Jalan Usaha Tani) terhambat sehingga mundur dari jangka waktu yang diperkirakan tetapi tetap terselesaikan 100%..

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018, mengampu dua urusan yakni urusan pilihan berupa urusan pertanian dan urusan wajib berupa urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Untuk mengukur capaian kinerja OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2016 akan dijabarkan sesuai dengan capaian kinerja SKPD pelaksana kegiatan tahun anggaran 2016 yaitu Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan Badan Pelaksanan Penyuluhan.

### **2.21. Analisis Kinerja Kantor Ketahanan Pangan**

Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung diukur dari 10 indikator kinerja daerah urusan ketahanan pangan dengan sasaran strategis **meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan daerah.**

Adapun capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	INDIKATOR KERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AKHIR RPJMD 2018	Capaian Kinerja 2016		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Ketersediaan energi per kapita	kcal/kap/hr	2980	2900	3020	100%
2	Cakupan ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	75,99	74,75	100,6	100%
3	peningkatan cadangan pangan masyarakat	unit	75	59	53	89,83%
4	Persentase penguatan cadangan pangan	%	10	10	10	100%
5	Cakupan Penanganan Kerawanan pangan	%	85	75	100	100%
6	Persentase meningkatnya skor Pola Pangan Harapan	%	91	90,45	85,5	94,53%
7	cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90	80	100	100%
8	Besaran Desa Mandiri Pangan	desa	10	9	9	100%
9	Besaran Percepatan penganeekaragaman Konsumsi Pangan	lokasi	5	4	6	100%
10	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	95	100	100%
<b>JUMLAH</b>						<b>98,44%</b>

### 1) Cakupan ketersediaan energi per kapita

Cakupan ketersediaan energi per kapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung.

Berdasarkan perhitungan NBM, diperoleh bahwa ketersediaan energi untuk tahun 2016 adalah sebesar 3020 kkal/kap/hr. Angka ketersediaan energi tersebut berasal dari ketersediaan energi dari pangan nabati dan hewani. Dengan capaian ini, maka target kinerja untuk

cakupan ketersediaan energi per kapita sebesar 2900 kkal/kap/hr telah tercapai tercapai 100 %

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2200 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah adalah 2000 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi , bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.

Pencapaian target kinerja ini merupakan sinergi atas berbagai program pembangunan bidang ketahanan pangan, utamanya di sektor produksi pertanian dalam arti luas yang dilaksanakan oleh SKPD-teknis terkait. Upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta mekanisasi pertanian menjadi pendorong utama peningkatan produksi pangan, yang memacu jumlah produksi pertanian tanaman pangan sebagai sumber pangan pokok (sumber karbohidrat) utama masyarakat Temanggung.

Faktor pengendalian pertumbuhan penduduk juga turut menjadi kunci tingkat ketersediaan energi maupun protein, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah konsumsi pangan, sedangkan secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan percepatannya tidak sebanding.

Kantor Ketahanan Pangan di Tahun 2016 turut mendukung pencapaian target kinerja tersebut melalui beberapa kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan dimana sarana untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung.

Berikut merupakan gambaran angka ketersediaan energi (AKE) Kabupaten Temanggung selama 2013-2016 :

Tabel 2.2.2 Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2016

No	Jenis Bahan Makanan	Ketersediaan Per Kapita											
		2013			2014			2015			2016		
		Energi	Protein	Lemak	Energi	Energi	Energi	Energi	Protein	Lemak	Energi	Protein	Lemak
		(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)	(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)	(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)	(kkal/hr)	(gr/hr)	(gr/hr)
1	Padi-padian	2.239	55,05	17,70	2244	54,99	17,11	2.218	53,86	15,28	2453	59,81	17,72
2	Makanan Berpati	230	1,53	0,77	199	1,34	0,77	201	1,36	0,80	19	0,18	0,45
3	Gula	-	-	-	-	-	-						
4	Buah Biji Berminyak	27	0,73	2,59	21	0,39	1,99	11	0,53	1,02	15	0,82	1,42
5	Buah-buahan	38,19	0,40	0,23	38	0,39	0,23	33	0,35	0,37	1	0,01	0,02
6	Sayur-sayuran	104	4,78	0,95	99	4,50	1,03	142	6,57	1,19	123	11,19	1,21
7	Daging	21	1,51	1,64	61	4,12	48,5	44	3,01	3,47	337	26,22	25,07
8	Telur	39	3,06	2,80	2,8	2,10	2	28	2,10	2,00	27	2,09	1,98
9	Susu	2	0,09	0,09	1	0,07	0,07	0	0,02	0,03	0	0,02	0,02
10	Ikan	1	0,11	0,01	4	0,84	0,06	9	1,78	0,16	1	0,19	0,01
11	Minyak lemak dan	23	0,02	2,54	22	0,02	2,44	4	0,00	0,048	40	0,07	4,44
<b>Jumlah</b>		<b>2.723</b>	<b>67,29</b>	<b>29,32</b>	<b>2716</b>	<b>68,75</b>	<b>30,58</b>	<b>2.691</b>	<b>69,58</b>	<b>24,79</b>	<b>3.020</b>	<b>100,6</b>	<b>52,64</b>

## 2) Cakupan ketersediaan protein per kapita

Protein merupakan komponen bahan pangan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Kedua komponen tersebut mendukung tercapainya cakupan ketersediaan protein sebesar 100.60 gr/kap/hr dimana target akhir renstra adalah 75.99 gr/kap/hari sehingga capaian kinerja untuk indikator cakupan ketersediaan protein per kapita telah tercapai 100%

Berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas di sektor peternakan dan perikanan, serta pengembangan komoditas tanaman pangan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan menjadi tumpuan ketersediaan protein daerah, meskipun untuk komoditas kedelai, Temanggung belum bisa swasembada, namun pasokan dari luar daerah mampu menjamin ketersediaan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Dukungan dari Kantor ketahanan Pangan untuk mencapai target kinerja dalam hal ini adalah melalui pelaksanaan kegiatan Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan, maupun pengembangan konsumsi pangan B2SA, dimana diantara outputnya adalah bantuan stimulan

ternak pekarangan, untuk meningkatkan ketersediaan pangan hewani sebagai sumber protein keluarga/rumah tangga.

### **3) Peningkatan cadangan pangan masyarakat**

Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat, yang dapat berupa cadangan pangan di tingkat rumah tangga, stok pangan di tingkat pedagang, maupun yang berada pada lumbung-lumbung pangan masyarakat.

Tahun 2016 telah dilaksanakan pemberdayaan lumbung pangan melalui kegiatan pemberdayaan lumbung pangan desa sejumlah 2 kelompok lumbung dari dana APBD I Provinsi Jawa Tengah, yaitu KT.Tani Makmur desa Caruban Kec.Kandangan serta Gapoktan Terus Makmur Desa Medari Kec.Ngadirejo melalui kegiatan pengisian lumbung pangan dengan bantuan berupa gabah kering masing – masing sejumlah 2.8 ton.

Disamping itu juga terlaksana kegiatan pembangunan Lumbung Cadangan Pangan di dua lokasi yaitu KT.Budi Lestari IV Desa Katekan Kec.Ngadirejo dan KT.Maju Lancar Desa Pitrosari Kec.Wonoboyo dengan sumber dana DAK senilai Rp.267.000.000.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan cadangan pangan masyarakat adalah Pendampingan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dimana terlaksana pendampingan untuk Gapoktan Rejo Makmur desa Rejosari Kec.Pringsurat yang pada tahun 2016 mendapatkan kegiatan LDPM dari APBD I senilai Rp.105.000.000 untuk modal usaha kelompok khususnya di bidang distribusi pangan.

Dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya :

1. Tersedianya modal usaha di gapoktan/ kelompok tani untuk mengembangkan usahanya
2. Harga gabah / beras di wilayah gapoktan dapat distabilkan, terutama pada saat panen raya
3. Akses pangan, khususnya bagi anggota gapoktan meningkat
4. Meningkatnya kemampuan manajemen gapoktan

Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2016 telah dilaksanakan upaya pemberdayaan bagi 53 lumbung, atau 89.83 % dari target kinerja sebesar 59 unit.



#### **4) *Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah***

Cadangan Pangan Pemerintah adalah cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Cadangan Pangan Pemerintah terdapat di tingkat desa berupa CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi yang berada pada BPCP (Balai Pengelolaan Cadangan Pangan), atau pusat yaitu pada perum BULOG, dimana tiap-tiap Kabupaten mendapat alokasi 100 ton untuk dipergunakan apabila terjadi bencana. Kabupaten Temanggung memiliki gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang berada di kelurahan Kertosari, dibangun melalui dana DAK tahun 2011 dengan kapasitas mencapai 100 ton.

Pengisian Gudang dilaksanakan setiap tahun, untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah, dan di Tahun 2016 telah dilaksanakan pengisian sebanyak 10 ton gabah kering giling melalui kegiatan Pengisian Gudang Cadangan Pangan sebagai Antisipasi Kerawanan Pangan. Dari target sebesar 10% dari 100 ton, dapat terlaksana sebesar 100%.

#### **5) *Persentase penanganan kerawanan pangan***

Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan penanganan terhadap permasalahan bidang ketahanan pangan, akibat bencana alam maupun gagal panen yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 7 lokasi, atau 100% dari keseluruhan proposal penanganan yang diajukan ke Kantor Ketahanan Pangan.

Dengan demikian, capaian ini telah memenuhi, bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu sebesar 75%. Capaian ini telah pula melampaui standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan kabupaten Kota, untuk indikator penanganan kerawanan pangan yang juga ditargetkan sebesar 60% di tahun 2015.

Penerima bantuan penanganan kerawanan pangan di tahun 2016 adalah masyarakat rawan pangan transien ringan yang terkena bencana alam maupun gagal panen akibat musim penghujan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.3. Daftar Penerima Bantuan Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Temanggung tahun 2016

Lokasi	Penyebab	Jumlah /Sumber
Ds. Blimbing- Kecamatan Kandangan	Gagal panen	1865 kg/ APBD II
Desa Jragan Kec.Tembarak	Gagal panen	1969 kg / APBD II
Desa Kwadungan Gunung Kec. Kledung	Gagal panen	2000 kg / APBD II
Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Gagal panen	2149 kg/ APBD II
Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang	Gagal panen	2017 kg / APBD II
Desa Lempuyang Kecamatan Candiroto	Banjir	500 kg / BPCP Prov.Jateng
Puskesmas Bulu	Gizi buruk	2420 kg / BPCP Prov. Jateng

### 6) *Meningkatnya skor pola pangan harapan*

Berdasarkan data survey konsumsi pangan yang telah dilaksanakan melalui Susenas tahun 2016, skor PPH Kabupaten Temanggung untuk tahun 2016 adalah 85,5. Hasil ini belum sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2015 yang mengacu dan selaras dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan yaitu sebesar 90,45, dan baru tercapai sebesar 94.5%.

Skor PPh menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, dimana semakin beragam, semakin tinggi pula skor PPH nya. Belum idealnya pola konsumsi masyarakat kita antara lain disebabkan oleh :

1. Tradisi/kebiasaan konsumsi masyarakat;
2. Tingkat pengetahuan terutama pengetahuan mengenai konsumsi pangan yang baik/ideal;
3. Tingkat ekonomi yang mempengaruhi kemampuan untuk menjangkau pangan yang cukup dan berkualitas.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan capaian skor PPH ideal, antara lain upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan melalui sosialisasi dan pelatihan dalam rangka percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

Upaya lain juga dilaksanakan untuk membantu masyarakat mengakses pangan beragam, serta pangan hewani sehubungan dengan harga pangan hewani yang cukup tinggi, yang belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut sebagai stimulan

pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi pola konsumsi yang diharapkan:

a. Fasilitasi Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA

Realisasi kegiatan berupa sosialisasi dan gerakan pangan dengan realisasi kegiatan berupa :

- Gerakan Pangan Lokal di Desa Jampirejo Kecamatan Temanggung
- Sosialisasi dan pemberian konsumsi B2SA di MI Gemawang Kecamatan Gemawang dan Plosogaden Kecamatan Candiroto

Melalui kegiatan ini pula disalurkan nutrisi tambahan bagi kelompok lansia, berupa bantuan susu kambing dengan tujuan memberikan tambahan nutrisi untuk meningkatkan kualitas konsumsi pada kelompok lansia, agar tetap sehat, produktif, dan berdaya guna.

b. Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Realisasi kegiatan berupa terfasilitasinya kegiatan Dekon TP Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk 6 kelompok wanita tani yaitu KWT. Sumber Rejeki di Desa Gandulan dan KWT. Dahlia Desa Tempuran (Kaloran), KWT. Berkah Tani Desa Kowangan (Temanggung), KWT. Sumber Rejeki Ds.Gesing (Kandangan), KWT. Bambu Runcing Desa Parakan Kauman Parakan) dan KWT. Dahlia Desa Nglorog (Pringsurat).

Selain kelompok penerima manfaat pada tahun yang berkenaan, kegiatan ini juga memfasilitasi kelompok pengembangan dari tahun 2015 sejumlah 6 kelompok, yaitu di Desa Rejosari (Pringsurat), Gentan (Kranggan), Sidorejo (Temanggung), Campursari (Ngadirejo), Plosogaden (Candiroto), serta Nglarangan (Tretap).

Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan secara optimal, untuk budidaya sayur, buah, ternak pekarangan, guna memenuhi ketersediaan pangan dan mencukupi kebutuhan gizi keluarga, dengan harga yang lebih terjangkau, dan kemudahan untuk mengaksesnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan bagi kelompok – kelompok wanita tani dalam

pengolahan pangan berbasis B2SA ( beragam, bergizi, Seimbang dan Aman ).

c. Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal

Melalui kegiatan ini dilaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal kepada kelompok – kelompok masyarakat di tingkat desa, yaitu :

- KWT Wijaya Kusuma, Desa Pateken Kecamatan Wonobojo
- KWT Pandan Arum , Desa Pitrosari Kecamatan Wonobojo
- KWT Sekar Setaman, Desa Wonobojo, Kecamatan Wonobojo
- KWT Wijaya Kusuma, Kelurahan Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung
- KWT Melati, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung
- KWT Dewi Shinta, Desa Ngropoh, Kecamatan Kranggan
- KWT Sekar Aji, Desa Traji Kecamatan Parakan

Di tahun 2016 dilaksanakan pula pelatihan pengolahan pangan lokal bekerja sama dengan SMKN I Temanggung, promosi pangan lokal dalam expo di luar daerah ( Gelar Pangan Nusantara di Pontianak dan Hari Pangan Sedunia di Boyolali) dan pasar murah untuk menstimulasi keragaman konsumsi, dan kampanye minum susu untuk membiasakan anak usia sekolah mengkonsumsi susu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak usia sekolah, dan meningkatkan skor PPH di untuk kelompok pangan hewani.

Diharapkan melalui pemberdayaan pangan lokal, preferensi dan konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal meningkat, serta dominasi konsumsi atas kelompok pangan tertentu menurun, sehingga skor pola pangan harapan akan meningkat.

### **7) Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**

Pengawasan keamanan pangan yang beredar di pasaran dilaksanakan dengan razia bersama oleh dinas/instansi terkait terhadap pangan yang beredar di masyarakat.

Kantor Ketahanan Pangan di tahun 2016 telah melaksanakan pengujian sampel pangan di lima pasar besar bersama-sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diantaranya pasar Temanggung, Pasar Ngadirejo, Pasar Kranggan, Pasar Parakan dan Pasar

Candiroto dengan akumulasi total 100 sampel pangan, dan didapatkan seluruh sampel dalam keadaan aman untuk dikonsumsi (100%), dengan demikian, target kinerja telah tercapai 100%, bahkan terlampaui.

Capaian kinerja tahun 2016 dapat memenuhi target kinerja yaitu 75 % sampel yang diambil dalam keadaan aman untuk dikonsumsi, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan isu keamanan pangan telah makin baik. Usaha lain yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan sosialisasi ke sekolah – sekolah tentang keamanan pangan dan leaflet-leaflet keamanan pangan sebagai sumber informasi mengenai keamanan pangan.

### **8) *Besaran Desa Mandiri Pangan***

Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Temanggung telah dicapai melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan maupun melalui kegiatan replikasi dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, di 8 desa, yaitu Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Desa Purwodadi Kecamatan Tembarak, Desa Purwosari Kecamatan Wonobojo, Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang, Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan, dan Desa Kalimanggis dan Desa Kaloran Kecamatan Kaloran, Desa Tlogowungu, Kecamatan Kaloran, melalui kegiatan Pengembangan Model Kemandirian Pangan Desa.

Dengan demikian, dari target sebanyak 9 desa, dapat tercapai 9 desa atau 90%, dari akumulasi capaian desa mandiri pangan pada kurun waktu 2014-2018.

Di tahun 2016, melalui Kegiatan Pendampingan Desa Mandiri Pangan, Kantor Ketahanan Pangan secara aktif melakukan pemantauan, pembinaan, sekaligus evaluasi pada desa-desa mandiri pangan yang telah ditumbuhkan.

### **9) *Besaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan***

Dari target capaian sebesar 4 kelompok di tahun 2016, dapat tercapai 6 kelompok, atau dengan kata lain target dapat terealisasi 100 %. Kelompok – kelompok tersebut adalah kelompok lanjutan dari tahun 2015 yaitu :

- KWT Berkah Tani, Kowangan, Temanggung

- KWT Dahlia, Nglorog, Peingsurat
- KWT Sidomukti, Gandulan, Kaloran
- KWT Dahlia, Tempuran, Kaloran
- KWT Sumber Rejeki, Gandulan, Kaloran
- KWT Bambu Runcing, Parakan Kauman, Parakan

## 1. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

Tabel 2.2.4. Perkembangan Harga Pangan Strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	Jenis Komoditas	Data Harga Bulan Berjalan Tahun 2016 (Rp/Kg)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Rata-rata
1	<i>Beras Medium</i>	Rp9.411	Rp9.222	Rp9.292	Rp9.278	Rp9.023	Rp9.322	Rp9.375	Rp9.417	Rp9.386	Rp9.469	Rp9.375	Rp9.382	Rp9.329
2	<i>Beras Premium</i>	Rp10.576	Rp10.241	Rp10.438	Rp10.254	Rp10.016	Rp10.082	Rp10.317	Rp10.393	Rp10.371	Rp10.644	Rp10.604	Rp10.750	Rp10.391
3	Jagung	Rp4.582	Rp3.759	Rp4.802	Rp5.167	Rp6.484	Rp5.171	Rp5.288	Rp5.369	Rp5.043	Rp4.750	Rp2.521	Rp4.013	Rp4.746
4	Ubi Kayu	Rp3.342	Rp2.963	Rp3.000	Rp3.079	Rp3.141	Rp3.404	Rp2.740	Rp3.179	Rp3.114	Rp3.125	Rp3.063	Rp3.105	Rp3.105
5	Gula Pasir	Rp12.658	Rp12.463	Rp12.510	Rp12.698	Rp13.909	Rp15.884	Rp16.587	Rp15.643	Rp14.729	Rp13.956	Rp13.292	Rp13.342	Rp13.973
6	Minyak Goreng	Rp10.025	Rp10.741	Rp11.031	Rp11.024	Rp11.648	Rp11.637	Rp11.548	Rp11.298	Rp11.629	Rp12.031	Rp12.000	Rp12.000	Rp11.384
7	Daging Ayam	Rp29.911	Rp31.593	Rp27.833	Rp27.460	Rp26.734	Rp29.644	Rp33.115	Rp30.024	Rp29.143	Rp28.625	Rp28.458	Rp28.263	Rp29.234
8	Daging Sapi	Rp102.089	Rp102.222	Rp102.500	Rp102.540	Rp102.578	Rp106.260	Rp113.173	Rp114.405	Rp113.571	Rp113.750	Rp113.125	Rp113.816	Rp108.336
9	Telur	Rp23.525	Rp21.944	Rp19.750	Rp18.833	Rp19.102	Rp20.979	Rp20.731	Rp20.310	Rp20.377	Rp19.344	Rp15.833	Rp17.434	Rp19.847
10	Terigu	Rp11.848	Rp9.778	Rp9.698	Rp9.389	Rp8.164	Rp8.521	Rp10.260	Rp8.870	Rp8.786	Rp8.594	Rp8.500	Rp8.487	Rp9.241
11	Kedelai Lokal	Rp6.220	Rp6.198	Rp6.263	Rp6.098	Rp6.145	Rp6.212	Rp6.311	Rp6.177	Rp6.556	Rp6.388	Rp5.450	Rp6.026	Rp6.170
12	Cabe Keriting	Rp29.551	Rp26.222	Rp40.313	Rp20.460	Rp16.156	Rp15.767	Rp17.654	Rp23.238	Rp26.200	Rp33.844	Rp42.625	Rp38.553	Rp27.549
13	Cabe Rawit	Rp15.494	Rp14.630	Rp29.375	Rp15.270	Rp9.938	Rp10.548	Rp14.231	Rp21.952	Rp13.857	Rp14.844	Rp22.208	Rp34.868	Rp18.101
14	Bawang Merah	Rp28.620	Rp23.333	Rp33.271	Rp35.524	Rp35.719	Rp29.562	Rp32.654	Rp34.357	Rp37.000	Rp32.844	Rp41.167	Rp37.711	Rp33.480
15	Bawang putih	Rp31.494	Rp30.185	Rp32.385	Rp34.143	Rp35.359	Rp35.055	Rp34.942	Rp32.190	Rp34.000	Rp33.844	Rp37.792	Rp36.921	Rp34.026
16	<i>Susu Kental Manis</i>	Rp10.842	Rp11.537	Rp11.625	Rp9.270	Rp9.422	Rp10.795	Rp10.894	Rp10.048	Rp10.886	Rp10.813	Rp11.042	Rp11.184	Rp10.697
17	<i>Susu Bubuk</i>	Rp25.146	Rp20.241	Rp20.750	Rp15.102	Rp29.844	Rp31.233	Rp30.000	Rp29.286	Rp29.857	Rp30.000	Rp25.875	Rp30.526	Rp26.488
18	Ikan	Rp29.329	Rp30.889	Rp31.000	Rp30.762	Rp36.469	Rp37.068	Rp37.558	Rp34.310	Rp33.857	Rp33.250	Rp33.000	Rp33.737	Rp33.436

Analisis distribusi pangan dilaksanakan oleh petugas enumerator secara mingguan oleh Kabupaten Temanggung, untuk dianalisis fluktuasi harga dan ketersediaannya.

Meskipun dalam APBD Kabupaten Temanggung 2016 belum dialokasikan anggaran untuk melaksanakan pemantauan ini, melalui kegiatan panel harga yang difasilitasi oleh APBD Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan pemantauan harga pangan di tingkat produsen dan tingkat eceran untuk beberapa komoditas pangan, antara lain beras premium, beras medium, beras termurah, jagung, kedelai, cabe merah keriting, bawang merah, gula pasir lokal, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi murni.

Fluktuasi harga disebabkan antara lain oleh faktor iklim, yang menyebabkan penurunan produksi bahan pangan, kenaikan permintaan masyarakat terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, maupun kelancaran distribusi pangan antar wilayah.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi harga ekstrim diatas 25% terjadi pada komoditas cabe merah keriting dan bawang merah. Namun demikian untuk komoditas pangan pokok utama seperti beras, jagung dan kedelai, harga relatif stabil, dan tidak sampai menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Dengan demikian dari 12 komoditas terpantau, 83% komoditas dapat dikatakan stabil.

Sedangkan dari segi akses pangan, meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, namun tingkat ketersediaan cukup untuk diperoleh masyarakat, dalam artian seluruh komoditas terpantau masih dapat diakses oleh masyarakat (100%), dengan demikian capaian ketersediaan informasi Pasokan harga dan akses pangan adalah 100%, melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 90%.



## 2.2.2. Analisis Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Pada tahun 2016, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Kepala Daerah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, setidaknya terdapat 8 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2016, yaitu :

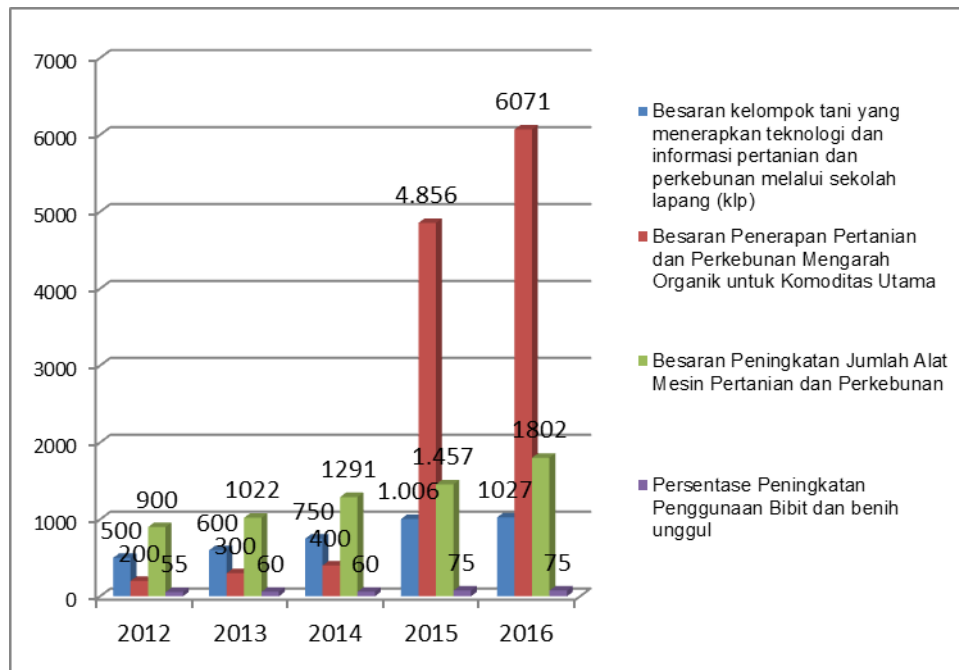
### 1. Sasaran 1 : Meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian	Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang	Kelompok	1.300	990	750	1.006	1027	100%	79%
		Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama	Ha	1.300	750	400	4.856	6071	100%	100%
		Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan	unit	1.272	1.172	1.291	1.457	1802	100%	100%
		Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul	%	70	65	60	75	75	100%	100%
		Rata-rata Capaian						100%	94,75%	

Secara umum capaian kinerja dari 4 indikator untuk sasaran “*Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian*” telah tercapai 100% dari target capaian kinerja 2016. Hal ini membuktikan bahwa upaya penerapan teknologi dan inovasi pertanian telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.2.1 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian

Penerapan teknologi pertanian dalam arti luas diwujudkan dengan pelaksanaan sekolah lapang petani baik pertanian maupun perkebunan yang telah diikuti oleh 2 kelompok pada tahun 2016 baik dari sumber dana APBD (Kabupaten, Provinsi) maupun APBN (TP. Kabupaten, TP. Provinsi, dan Dekonsentrasi) antara lain melalui kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul pada kelompok :

1. KT ADI Makmur 2 Desa Nglondong Kecamatan Parakan
2. KT. Makmur 2 Desa Campursalam Kecamatan Parakan.

Besaran penerapan teknologi untuk mengarah pertanian organik pada tahun 2016 meningkat 1.315 Ha dari capaian tahun 2015 sebesar 4756 Ha sehingga akumulasi pada tahun 2016 mencapai 6071 Ha, telah dilakukan melalui kegiatan – kegiatan antara lain :

1. Pengembangan Padi Organik seluas 100 hektar
2. Bantuan APPO 7 unit untuk luasan 25 hektar per unit, sehingga total luas 175.
3. Pupuk berimbang pada tanaman kopi di lahan tembakau seluas 40 hektar
4. Gerakan Penanaman Jarwo Hibrida seluas 1.000 hektar

Pemberian bantuan APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik) dimaksudkan untuk membantu petani dalam mengembangkan budidaya secara organik sehingga petani memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pupuk organik. Hal ini merupakan salah satu upaya nyata untuk mengarahkan kelompok tani agar mulai mengarah ke pertanian organik.

Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan pada tahun 2016 mencapai 345 unit sehingga akumulasi jumlah alat mesin pertanian pada tahun 2016 mencapai 1802 unit, hal ini menunjukkan adanya peningkatan intervensi teknologi dan inovasi di bidang pertanian.

Jumlah bantuan alat mesin pertanian dan perkebunan yang bersumber dari APBD (Dana DBHCHT) dan Dana Dekonsentrasi serta bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah totalnya sebanyak 345 unit, antara lain:

1. Corn Sheller (Tugas Pembantuan Dirjen TP) sebanyak 5 Unit
2. Power Thresher (Tugas Pembantuan Dirjen TP) sebanyak 8 unit
3. Kultivator (Kegiatan Hortikultura APBN) sebanyak 30 Unit
4. Kultivator (APBD Kabupaten) sebanyak 25 Unit
5. Kultivator (APBD Provinsi) sebanyak 2 Unit.
6. Pompa Air (Kegiatan Hortikultura APBN) sebanyak 12 unit
7. Pompa Air (Kegiatan Alsintan APBN) Sebanyak 60 Unit
8. Pompa Air (APBD Kabupaten) sebanyak 26 unit
9. Hand Traktor (Kegiatan Alsintan APBN) sebanyak 2 Unit
10. Power Thresher (APBD Kabupaten) sebanyak 6 unit
11. Hand Traktor (APBD Kabupaten) 27 unit
12. Kultivator (APBD Kabupaten) 25 Unit
13. Pompa Air (APBD Kabupaten) 26 unit
14. Corn Shearer (APBD Kabupaten) 5 unit
15. APPO (APBD Provinsi) 5 unit
16. Kultivator (APBD Provinsi) 2 unit

Dalam rangka terus melakukan perbaikan varietas tembakau, maka Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Temanggung melakukan kerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat ( BALITTAS ) Malang. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pemuliaan benih tembakau melalui kegiatan Penggunaan Benih Bermutu Yang Bersertifikat Sesuai Permintaan Pasar. Lokasi uji di laksanakan di lahan tegal Desa Glapansari Kec.Parakan dan Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo, serta lahan sawah di Desa Traji kec.Parakan. Kegiatan tersebut menunjukkan indikator keberhasilan yaitu dihasilkannya varietas Kemloko Baru yang tahan terhadap 3 penyakit utama tanaman tembakau, yaitu *Raistonia solanacearum*, *Phytophthora nicotianae*, dan nematode *Meloidogyn spp.* Diharapkan varietas tembakau yang baru dapat diterima petani sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas tembakau.

Penggunaan bibit unggul di masyarakat pada akhir RPJMD ditargetkan sebesar 70%. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan bibit/benih unggul sudah mulai meningkat dengan capaian kinerja Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul sebesar 75% pada tahun 2016 sehingga target RPJMD telah tercapai 100%.

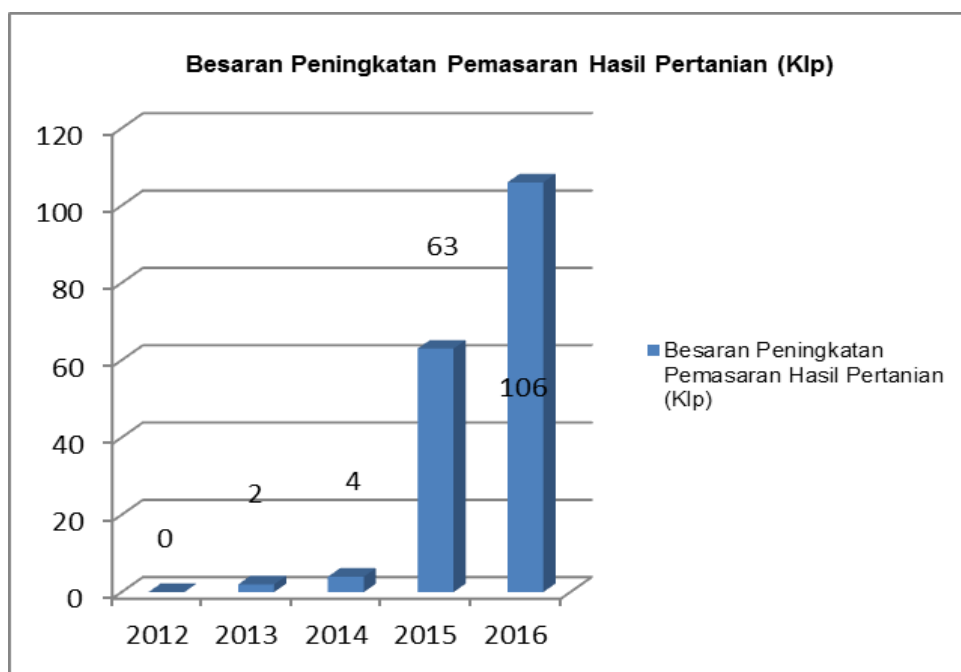
## 2. Sasaran 2 : *Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian*

Capaian kinerja pada sasaran 2 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian	Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	kelompok	12	8	4	63	106	100%	100%

Sasaran Strategis “*Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian*” diukur dengan indikator Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian. Pada tahun 2016 terdapat 43 kelompok yang telah dibina untuk meningkatkan kualitas produk dan jangkauan pemasarannya, sehingga akumulasi kelompok yang telah dibina sampai dengan tahun 2016 sebanyak 106 kelompok. yang berada di Kecamatan Bulu, Wonoboyo, Candiroto, Selopampang, Kaloran, Kandangan Kranggan, Pringsurat, Bansari, Ngadirejo, Tembarak, Tlogomulyo, Pringsurat dan Tretep dengan komoditas unggulan berupa buncis, cabai, sayuran daun, labu siam, kopi, jahe dan salak, serta tanaman perkebunan berupa cengkeh dan kopi. Dalam rangka meningkatkan pemasaran produk – produk pertanian, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan – kegiatan pameran / expo.



Gambar 2.2.2 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian

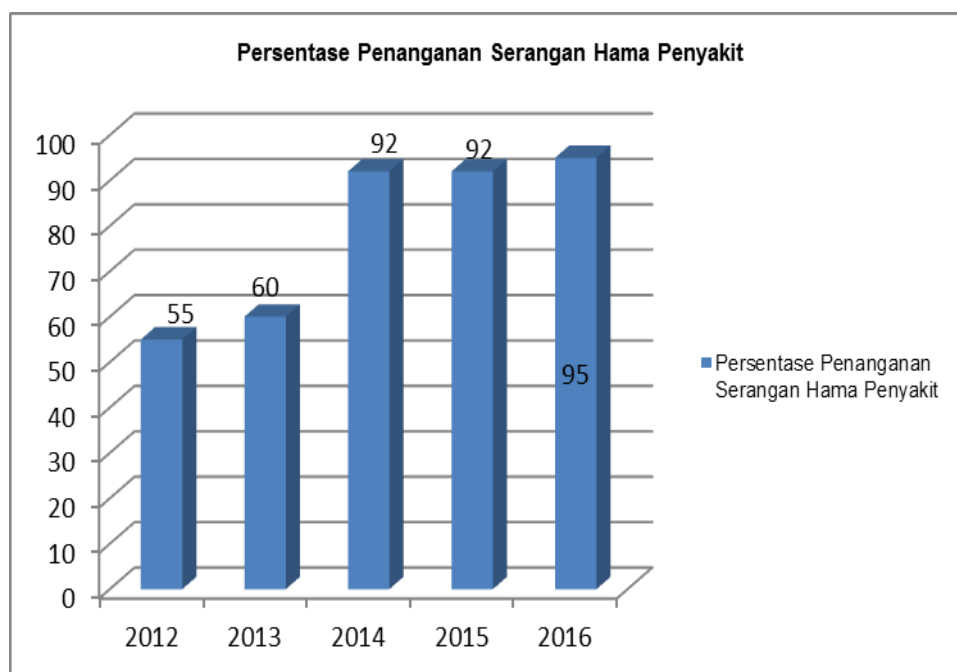
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemasaran hasil pertanian pada tahun 2016 adalah kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan. Kegiatan tersebut berhasil membentuk kelembagaan petani komoditas pertanian perkebunan melalui Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi wadah petani cengkeh di Kabupaten Temanggung. Untuk menambah pengetahuan petani cengkeh, maka dilaksanakan studi banding ke petani cengkeh di Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang pada tanggal 9 November 2016 yang diikuti oleh 40 orang perwakilan kelompok-kelompok petani.

### 3. Sasaran 3 : *Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian dan perkebunan*

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Produksi Pertanian Dan Perkebunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian dan perkebunan	Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit	%	85	95	92	95	95	100%	100%
		Rata-Rata Capaian							100%	100%



Gambar 2.2.3 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Produksi Pertanian Dan Perkebunan

Sasaran strategis “*Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian dan perkebunan*” diukur dengan indikator Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit. Hal ini diartikan dengan makin besar persentase penanganan serangan hama dan penyakit maka kualitas hasil produk pertanian dan perkebunan akan meningkat. Serangan hama pada tanaman padi yang paling utama adalah tikus dan penggerek batang. Serangan hama pada komoditas Hortikultura antara lain virus kuning, jamur fusarium, ulat grayak, aphid, lalat buah, sedangkan serangan hama pada tanaman kopi hama bubuk buah kopi, lalat buah, dan pada tanaman tembakau uret, ulat grayak, gangsir, dan aphid.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas produksi pertanian, yaitu diantaranya dengan pengadaan obat – obatan / pestisida untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman. Tikus sebagai salah satu hama utama

pada tanaman padi juga mendapatka perhatian khusus dalam pengendaliannya. Beberapa upaya untuk mengendalikan hama tikus diantaranya :

1. Melaksanakan kegiatan gropyokan tikus dengan target membasmi 150.000 ekor tikus dan pada tahun 2016 dapat dibasmi sebanyak 23.317 ekor tikus.
2. Pengadaan rhodentisida / obat pembasmi hama tikus
3. Pengadaan perangkap tikus
4. Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tikus sebanyak 12 kali pertemuan

5. Penyusunan Perda Pelestarian Satwa sebagai salah satu upaya melindungi burung hantu yang merupakan musuh alami hama tikus

Persentase penanganan serangan hama penyakit pada tahun 2016 sebesar 95% dari kejadian yang dilaporkan. Besarnya penanganan serangan hama penyakit berpengaruh terhadap capaian produktivitas tanaman pertanian.

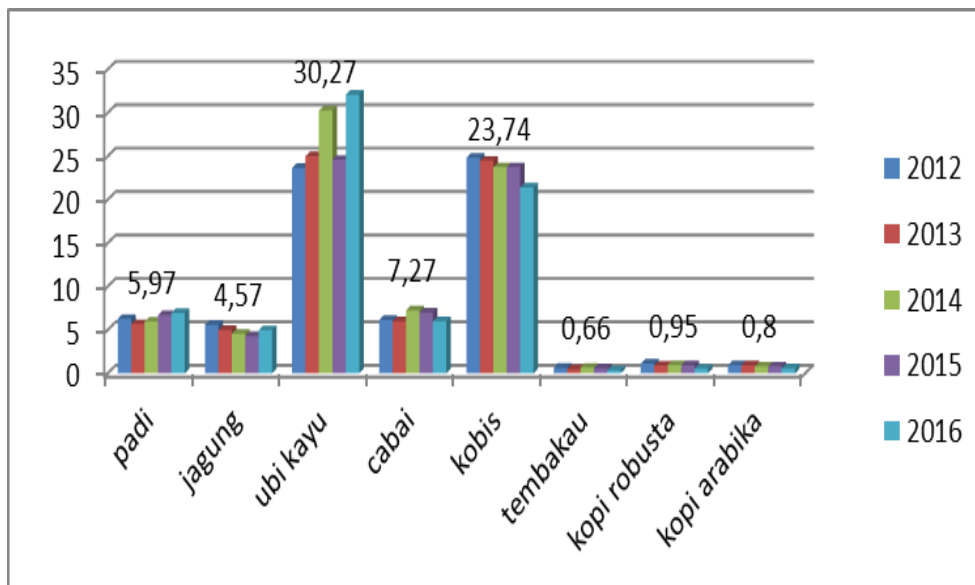
#### **4. Sasaran 4 : Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan**

Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan diukur dengan 8 indikator produktivitas tanaman unggulan di Kabupaten Temanggung antara lain padi, jagung, ubi kayu, cabai merah, kobis, tembakau, kopi Robusta dan kopi Arabika

Tabel 2.2.8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi, Produktivitas Dan Diversifikasi Tanaman Pertanian Dan Perkebunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan	Peningkatan produktifitas Padi	Ton/ Ha	6,99	6,58	5,97	6,70	6,94	100%	99,28%
		Peningkatan produktifitas Jagung	Ton/ Ha	6,88	6,03	4,57	4,28	4,97	79%	72,24%
		Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Ton/ Ha	27,61	26,02	30,27	24,60	32,10	100%	100%
		Peningkatan produktifitas Cabai	Ton/ Ha	6,70	6,30	7,27	7,02	6,00	95%	89,55%
		Peningkatan produktifitas Kobis	Ton/ Ha	27,05	26,00	23,74	24	21,4	82%	79,11%
		Peningkatan produktifitas Tembakau	Ton/ Ha	0,79	0,72	0,66	0,58	0,36	50%	45,57%
		Peningkatan produktifitas Kopi Robusta	Ton/ Ha	1,10	0,99	0,95	0,92	0,56	57%	50,91%
		Peningkatan produktifitas Kopi Arabika	Ton/ Ha	0,90	0,85	0,80	0,81	0,58	68%	64,44%
		Rata-rata						78,8%	77,94%	

Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran strategis ini adalah 78,8 % jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir renstra adalah sebesar 77,94%. Hanya produktifitas padi dan ubi kayu yang kinerjanya dapat mencapai target 100 % baik dibandingkan dengan target tahun 2016 maupun target akhir renstra. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan salah satunya melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan yang terdiri dari 19 jenis kegiatan dengan total anggaran Rp. 4.896.711.500. Capaian kinerja untuk indikator peningkatan produktivitas cabai tercapai 95 % dari target kinerja 2016. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya dukungan melalui program - program dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan cabai. Dari 8 indikator capaian kinerja, ada 3 indikator yang capaian kinerjanya dibawah 70% dari target 2016 , yaitu peningkatan produktifitas tembakau, kopi robusta dan kopi arabika. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dimana tahun 2016 terjadi anomali iklim yaitu terjadinya La nina, dimana menyebabkan terjadinya hujan yang terjadi secara merata di sepanjang tahun sehingga panen dan pengeringan tembakau dan pematangan kopi banyak mengalami kegagalan, sehingga berimbas terhadap penurunan produktivitas pada komoditas tersebut.



Gambar 2.2.4 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi, Produktivitas Dan Diversifikasi Tanaman Pertanian Dan Perkebunan ( Ton / Ha )

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan produksi, produktifitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan adalah dengan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Upaya ini diwujudkan dengan disahkannya Peraturan



Daerah No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

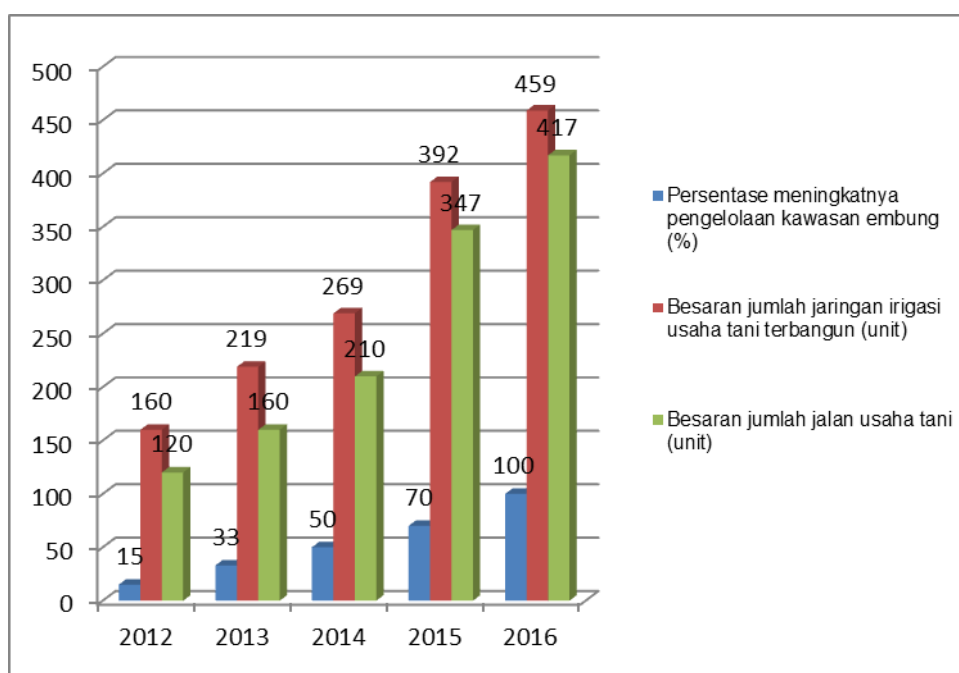
Diharapkan dengan adanya aturan ini maka laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan

### 5. Sasaran 5 : Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan	Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung	%	100	83	50	70	100	100%	100%
		Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun	unit	469	369	269	392	459	100%	97,87%
		Besaran jumlah jalan usaha tani	unit	410	310	210	347	417	100%	100%
		Rata-rata							100%	99%



Gambar 2.2.5 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Infrastruktur Pertanian dan Perkebunan

Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian dan Perkebunan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung, jumlah jaringan irigasi usahatani terbangun, dan jumlah jalan usaha tani. Pada tahun 2016 ketiga indikator tersebut tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Sumber dana yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten baik DAU, DAK maupun DBHCHT dan dana APBN Dekonsentrasi.

Tahun 2016 terbangun 5 unit embung baru yaitu tersebar di desa Tretep, Tempelsari dan Simpar ( Kec.Tretep ) serta di desa Cemoro dan Wates ( Kec. Wonoboyo ). Untuk Tahun 2016 target pengelolaan kawasan embung adalah 83 % dan capaian kinerja pada tahun 2016 adalah 100%. Capaian tersebut sudah sejalan dengan target akhir renstra yaitu pengelolaan kawasan embung sebesar 100 %.

Pembangunan Jalan Usaha Tani di tahun 2016 tercapai 70 unit dengan anggaran Rp. 4.000.000.000 dan sebaran lokasinya adalah sebagai berikut :

- 2 unit di Kecamatan Wonoboyo, Bansari, Ngadirejo, Temanggung, Tlogomulyo, Selopampang dan Pringsurat.
- 3 Unit di kecamatan Kedu, Kaloran, Candiroto, Bejen, Parakan dan Tembarak.
- 4 Unit di kecamatan Gemawang
- 5 Unit di Kecamatan Kledung
- 6 Unit di Kecamatan Kandangan
- 7 Unit di Kecamatan Tretep
- 8 Unit di Kecamatan Bulu

Dengan adanya pembangunan 70 unit JUT tersebut total JUT di tahun 2016 adalah sebanyak 417 unit, sedangkan target kinerja tahun 2016 adalah 310 unit dan target akhir renstra adalah 410 unit atau telah tercapai 100%

Pembangunan jaringan irigasi usaha tani merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP). Pembangunan jaringan irigasi dilakukan dengan berdasarkan Daerah Irigasi dan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) maupun oleh pihak ketiga secara kontraktual sebagai stimulan untuk mengelola irigasi secara partisipatif. Target untuk indikator kinerja besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani yang terbangun di tahun 2016 adalah 369 unit dan pada akhir tahun 2016 telah tercapai sebanyak 459 unit atau telah tercapai 100 %, sedangkan target akhir renstra adalah 469 unit sehingga capaian kinerja di tahun 2016 adalah 97,87 %.

Pada tahun 2016 terlaksana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani sejumlah 67 unit, dengan rincian : 13 unit kegiatan pembangunan irigasi, serta 5 unit pembangunan embung/ bending mini yang dilaksanakan oleh kelompok tani dan bersumber dana dari DAK.

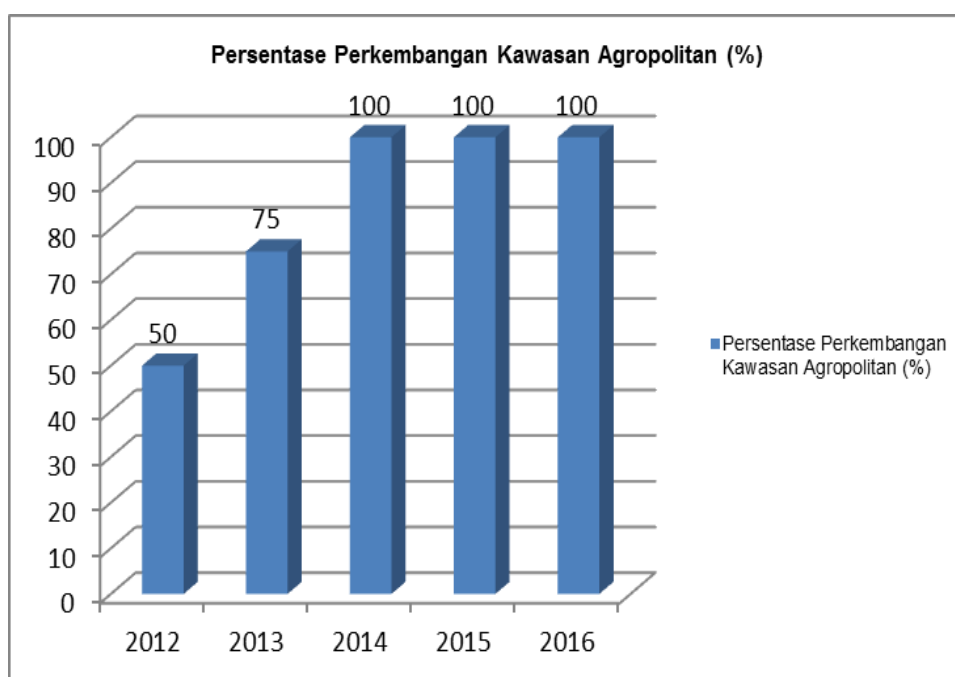
Selain itu juga dilaksanakan kegiatan dari APBN yang dilaksanakan oleh P3A berupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebanyak 41 unit, Pengembangan Embung Pertanian sebanyak 6 unit, dan Pengembangan Sumber Air sebanyak 2 unit. Lokasi pembangunan / rehabilitasi jaringan irigasi tahun 2016 tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung.

### 6. Sasaran 6 : Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.10. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2015	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan	Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan	%	100	100	75	100	100	100%	100%



Gambar 2.2.6. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Sasaran strategis “Meningkatnya pengembangan kawasan Agropolitan” diukur dengan indikator Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 sebesar 100%. Pengembangan kawasan agropolitan telah dilakukan sejak periode RPJMD 2008-2013. Dari keempat kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dalam RTRW yaitu Kledung, Pringsurat, Gemawang dan Selopampang telah dilakukan upaya pengembangan kawasan antara lain dengan pemberdayaan kelompok tani kawasan agropolitan melalui pelatihan – pelatihan dan pemberian bantuan sarana produksi berupa bibit buah-buahan dan pupuk.

### **7. Sasaran 7 : Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

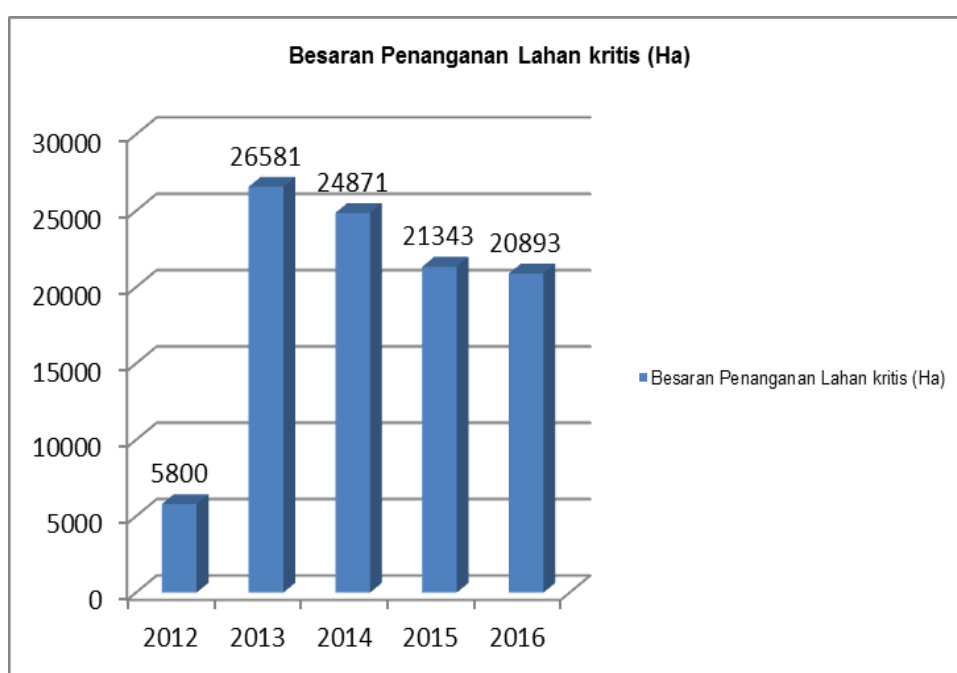
Tabel 2.2.11. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2016	% CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	Besaran Penanganan Lahan kritis	Ha belum tertangani	11.581	17.581	24.871	21.343	20.893	15 %	29.9%

#### Konservasi Tanah

Keterangan :

Target Penanganan tiap tahun 3.000 Ha \*parameter pengukuran tahun 2012 dan 2013 berbeda.



Gambar 2.2.7. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah

Pada tahun 2013 BP DAS SOP Yogyakarta melaksanakan Review Data Luas lahan Kritis di wilayah DAS Serayu Opak dan Progo dengan hasil bahwa luas lahan kritis Kabupaten Temanggung secara keseluruhan 33.981,4 Ha. Lahan kritis di luar kawasan hutan 25.478,97 Ha dan dalam kawasan 8.502,4 Ha. Lahan kritis dalam kawasan menjadi kewenangan Perum Perhutani KPH Kedu Utara, sedangkan lahan kritis di luar kawasan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah penanganannya. Penentuan kriteria kekritisan lahan didasarkan pada penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, produktivitas dan manajemen kawasan.

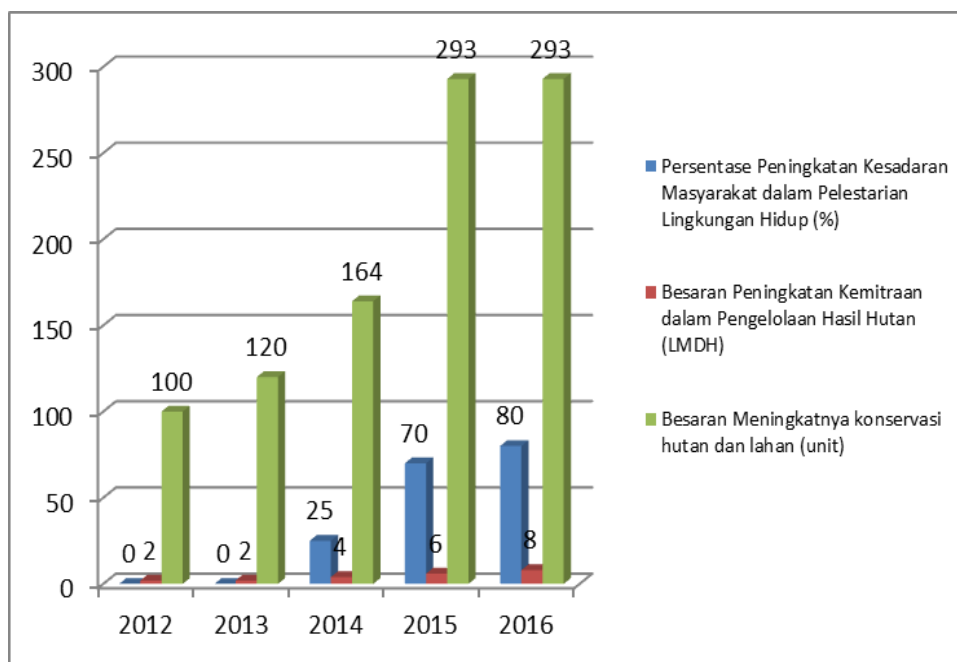
Sasaran strategis Meningkatnya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah ditentukan oleh indikator besaran penanganan lahan kritis. Pada Renstra ditetapkan bahwa target penanganan lahan kritis adalah 3.000 Ha tiap tahun. Pada tahun 2016 penanganan lahan kritis hanya dapat tercapai 450 Ha atau 15% dari target kinerja tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, dimana pada tahun – tahun sebelumnya dialokasikan anggaran untuk pembangunan Kebun Bibit Rakyat untuk menangani lahan kritis seluas 4000 ha, namun untuk tahun 2016 anggaran tersebut tidak dialokasikan. Adapun kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pengadaan bibit kehutanan sebanyak 110.000 batang (bibit sengon, sirsak, bambu, dan kayu afrika), sosialisasi Kebun Bibit Rakyat, serta pengadaan sarana pendukung kehutanan.

### 8.Sasaran 8 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA (2014-2018)	TARGET KINERJA 2016	REALISASI CAPAIAN KINERJA			% CAPAIAN THD TARGET 2015	% CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
						2014	2015	2016		
1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.	%	100	75	25	70	80	100%	100%
		Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan	kelompok	12	8	4	6	8	100%	66.67%
		Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan	unit	370	234	164	293	293	100%	100%
		Rata-rata							100%	100%



Gambar 2.2.8. Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan

Sasaran strategis “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan” ditentukan oleh 3 (tiga) indikator yaitu :

- a. persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup,

b. Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan

c. Besaran Meningkatnya konservasi hutan dan lahan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kader Konservasi, dan melibatkan perusahaan – perusahaan kayu dalam pengelolaan lingkungan.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup pada tahun 2016 tercapai 100% dari target kinerja dimana 6 (APHR Manunggal Lestari Kalimanggis Kaloran, APHR Wonobojo I Wonobojo, KPHR Soyo Rejo Ngadisepi Gemawang, APHR Gemawang Lestari Gemawang, APHR Makaryo Tani Candirotro, APHR Guyub Lestari Getas Kaloran) kelompok telah mendapatkan pembinaan pemahaman tentang konservasi.

Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan dilakukan dengan melaksanakan pertemuan dengan pihak perusahaan pengolah kayu yang ada di Kabupaten Temanggung dan pertemuan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada Di Kecamatan Ngadirejo dan Candirotro dengan capaian kinerja 100%. Sasaran tersebut di capai melalui kegiatan Fasilitasi dan Rekonsiliasi PSDH, yaitu dengan terlaksananya kemitraan 2 kelompok APHR dan pembinaan penatausahaan di 30 perusahaan besar / kecil.

Peningkatan konservasi hutan dan lahan diukur dengan jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2016 tidak terdapat penambahan bangunan sipil teknis sehingga total bangunan sipil teknis masih sama dengan kondisi tahun 2015 yaitu 293 unit. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk bangunan sipil teknis mulai tahun 2016 ditarik ke Badan Lingkungan Hidup.

### 2.2.3. Analisis Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan

Tabel 2.2.13. Capaian Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target RPJMD 2013-2018	CAPAIAN KINERJA 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan	kali/tahun	10,00	7	7	100%
2	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh	orang/thn	3,00	3	4	100%
3	Rasio jumlah kelompok tani maju dengan jumlah total kelompok tani kali 100 %	%	8,05	8,05	8,05	100%
4	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani	orang/thn	12400,00	7440	7450	100%
5	Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	87,89	58,46	58,5	100%
6	Jumlah pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	unit/thn	70,00	40	41	100%
JUMLAH						100%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Penyuluhan di Kabupaten Temanggung dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penyuluhan diukur dari Indikator :

1. Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikan di sekala nasional tercapai sesuai target 100%, dari target 7 materi, terealisasi 7 materi penyuluhan yang dipublikasikan.
2. Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh tercapai sesuai target (100%), ditargetkan 3 orang penyuluh tercapai 4 orang penyuluh.
3. Rasio jumlah kelompok tani maju (yang meningkat kelasnya) tercapai 100% target 8,05% terealisasi 8,05%, dengan penjelasan 124 kelompok tani yang naik kelas (pemula - madya - utama) dari total 1.540 kelompok tani
4. Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani tercapai 100% target 7440 orang petani terealisasi 7450 orang petani.
5. Cakupan pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) tercapai 100% dari target 58,46% penjelasan jumlah penumbuhan posluhdes s.d. tahun 2016 terealisasi 170 posluhdes dari 289 desa yang ada



6. Jumlah pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP) s.d. tahun 2016 tercapai 100% dari target 40 LEP dan terealisasi 41 LEP.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran, Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan, Belanja Langsung termasuk kegiatan rutin kesekretariatan adalah sebesar Rp. 2.685.969.811 atau 91,69 % dari total pagu sebesar Rp 2.929.441.350,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8, 31% dari Pagu yang ditentukan

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program dan kegiatan sbb. :

1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan anatara lain adalah :
  - a. Pengelolaan Data / Data Base
  - b. Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan anatara lain adalah :
  - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
  - b. Monitoring dan Evaluasi
  - c. Rakor Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perdesaan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan anatara lain adalah :
  - a. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan anatara lain adalah :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - d. Penyediaan alat tulis kantor
  - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
  - h. Penyediaan makanan dan minuman

- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - k. Jasa Pelayanan perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain adalah :
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - e. Pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Parakan
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan antara lain adalah :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan antara lain adalah :
- a. Penunjang DAK Sarpras Penyuluhan
8. Program Pemberdayaan Petani, dengan kegiatan antara lain adalah :
- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani
  - b. Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani
  - c. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Tani Berbasis Konservasi
  - d. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani
  - e. Kegiatan Fasilitasi Replikasi Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian
  - f. Kegiatan Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Sawa sebagai Musuh Alami Hama Tanaman
  - g. Kegiatan Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Unggulan
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan kegiatan antara lain adalah :
- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
  - b. Kegiatan Peningkatan Kinerja Penyuluhan

- c. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh pertanian (THL-TBPP)

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD**

Isu penting dalam pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Masih belum optimalnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian.
2. Perubahan Musim (anomali iklim) dan Gangguan Hama Penyakit Tanaman.
3. Belum optimalnya penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
5. Belum meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian serta pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan;
6. Belum meningkatnya kelembagaan petani yang handal dan mandiri dalam pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Belum meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian yang berwawasan lingkungan;
8. Belum meningkatnya diseminasi teknologi dan informasi pertanian yang berwawasan lingkungan
9. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan petani
10. Terdapat potensi kerawanan pangan akibat faktor ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.
11. Terjadinya Fluktuasi harga pangan, tingkat kesejahteraan, keberadaan sarana dan prasarana distribusi yang beragam, menimbulkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan
12. Masih ada Ketergantungan masyarakat akan pangan pokok tertentu non lokal sehingga perlu mendapat perhatian
13. Beredarnya pangan baik segar maupun olahan yang mengandung bahan tambahan berbahaya
14. Beberapa daerah di Kabupaten Temanggung termasuk rawan bencana, adanya ancaman bencana kekeringan dan puso yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 antara lain:

1. Terjadinya musim penghujan yang merata dan terus menerus sepanjang tahun akibat efek La Nina, berakibat menurunnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian dalam arti luas, serta terjadinya perkembangan hama dan penyakit pada tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
2. Ketersediaan dan permintaan/kebutuhan pasar komoditas pertanian (misalnya gabah, cabai, bawang merah, tembakau, dll) yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga.
3. Menurunnya minat tenaga kerja di bidang pertanian disebabkan karena harga komoditas pertanian kurang kompetitif.
4. Petani kopi belum sepenuhnya mengikuti anjuran petik merah karena selisih harga yang tidak signifikan antara kopi petik hijau dengan petik merah.
5. Kualitas produk tembakau belum optimal sesuai yang diharapkan karena petani masih banyak yang mencampurkan produk tembakau lokal dengan tembakau impor.
6. Infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jalan usaha tani) dan alat mesin pertanian belum merata di semua daerah.
7. Keterbatasan sumber daya aparatur dan keterbatasan anggaran.
8. Masalah ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah menimbulkan potensi kerawanan pangan
9. Fluktuasi harga pangan, tingkat kesejahteraan, keberadaan sarana dan prasarana distribusi yang beragam, menimbulkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan
10. Ketergantungan masyarakat akan pangan pokok tertentu non lokal perlu mendapat perhatian
11. Beredarnya pangan baik segar maupun olahan yang mengandung bahan tambahan berbahaya
12. Beberapa daerah di Kabupaten Temanggung termasuk rawan bencana, adanya ancaman bencana kekeringan dan puso yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan
13. Harga komoditas pertanian masih ditentukan oleh tengkulak sehingga petani sebagai produsen tidak dalam posisi yang menguntungkan.

14. Kapasitas penyuluh dan petani dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian serta pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan
15. Kelembagaan petani yang handal dan mandiri dalam pengembangan ekonomi kerakyatan belum optimal
16. Belum tercapainya efektivitas diseminasi teknologi dan informasi pertanian yang berwawasan lingkungan

Memperhatikan isu-isu penting tersebut di atas dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, maka dalam jangka pendek kegiatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung difokuskan pada :

1. Perluasan, pengembangan dan membina keberlanjutan program peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Kembali dilakukannya program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan untuk mengatasi semakin menyempitnya lahan pertanian.
2. a. Antisipasi perubahan musim dengan ;
  - (1) Mitigasi Perubahan Iklim Tanaman Pertanian
  - (2) Sekolah Lapang Iklim
  - (3) Sosialisasi Prediksi Iklim di Kabupaten Temanggung bagi Masyarakat
  - (4) Pelatihan Prediksi Iklim Bagi Petugas Kecamatan dan Kabupaten
  - (5) Perbaikan teknis budidaya
  - (6) Pengaturan Pola Tanam
  - (7) Pengairan berselang (*intermittent*) untuk menghemat sumber daya air
  - (8) SRI (*system rice intensification*)
  - (9) Penggunaan Varietas baru dan unggul (genjah)
  - (10) Pemupukan Berselang
  - (11) Pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan untuk areal tanaman pangan semusim (padi gogo varietas situbagendit, situpatenggang, maupun jagung)
- b. Pengendalian hama penyakit tanaman, dengan menggiatkan kegiatan pencegahan dan pengendalian (geropyokan tikus), sanitasi lingkungan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu.
3. Ketersediaan dan permintaan/kebutuhan pasar komoditas pertanian (misalnya gabah, cabai, bawang merah, tembakau, dll) yang tidak

seimbang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga, sehingga diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Masih sangat diperlukan kursus dan pelatihan yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan nilai jual dan daya saing produk.
  - b. Membuka dan menjalin kemitraan, link dan jaringan pemasaran
  - c. Pembentukan asosiasi (paguyuban) untuk komoditas dan produk sejenis sehingga akan mempermudah pemasaran produk yang kadang diminta dalam jumlah yang besar dan tidak mampu dilakukan secara perorangan
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia :
- a. Penambahan SDM berbasis potensi dan teknis dengan spesialisasi sesuai kebutuhan dan penguasaan program
  - b. Jika hal tersebut belum dapat dipenuhi, maka sangat diperlukan pelatihan pembekalan awal sehingga mampu memahami tugas yang akan dilaksanakan.
  - c. Mengoptimalkan kinerja pegawai Kantor Ketahanan Pangan
5. Menggunakan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Diketahui bahwa rancangan awal RKPD disusun melalui analisis kebutuhan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Daftar program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan daftar program dan kegiatan yang dibutuhkan OPD untuk menjalankan fungsi pelayanan Perbedaan nominal antara rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan pada program disebabkan karena pada rancangan awal RKPD yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat ditampung melalui mekanisme musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui proses musrenbang dan forum OPD diperoleh data usulan masyarakat untuk pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan sebagaimana disebutkan dalam tabel 2.4. Tidak semua usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diakomodir anggaran APBD Kabupaten Tahun 2018, di harapkan dapat terakomodir di program APBD Propinsi Jawa Tengah ataupun APBN tahun 2018.

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.1.1. Kebijakan Kementerian Pertanian**

Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, pembangunan dalam lima tahun kedepan pertanian dalam 5 tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Yusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA).

Berdasarkan Sembilan Agenda Priotitas (NAWA CITA), maka agenda prioritas bidang pertanian terdiri dari dua hal yaitu:

1. Peningkatan Agroindustri;

Sasaran dari peningkatan agroindustry adalah:

- a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Pangan dan minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif
- b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor
- c. Berkembangnya agroindustry terutama di pedesaan. Komoditi yang menjadi focus dalam peningkatan agroindustry diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, the, kopi, kelapa, manga, nenas, manggis, salak dan kentang

2. Peningkatan Kedaulatan Pangan.

3. Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan:

- a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri



- b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri
- c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Target makro pembangunan pertanian selama tahun 2015-2019 mencakup pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, investasi, tenaga kerja dan Nilai Tukar petani.

#### 1. Produk Domesti Bruto (PDB)

Selama periode 2015-2019, PDB nasional diharapkan tumbuh rata-rata diatas 7%, sedangkan PDB pertanian (diluar perikanan dan kehutanan) diharapkan tumbuh diatas 3,80%.

#### 2. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) diperkirakan masih cukup besar. Namun demikian diproyeksikan dengan semakin baiknya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di periode 2015-2019, maka diharapkan laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian menjadi menurun

#### 3. Investasi Sektor Pertanian

Investasi pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyeksi sasaran investasi PMDN untuk sektor pertanian pada tahun 2019 adalah sekitar 12,06 triliun rupiah, sedangkan proyeksi sasaran investasi PMA untuk pertanian pada tahun 2019 sekitar 1.7 miliar US\$. Tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun dari PDN dan PMA bidang pertanian diperkirakan sekitar 5,0 dan 4,7 % per tahun.

#### 4. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian

Neraca perdagangan pertanian diupayakan terus mengalami surplus, dimana kontribusi terbesar masih diharapkan dari sub-sektor perkebunan. Walaupun untuk produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih deficit, namun diharapkan impor bahan pangan dapat dikendalikan dengan kebijakan yang tepat. Neraca perdagangan pertanian selama tahun 2015-2019 diharapkan menunjukkan tren surplus yang terus meningkat.

## 5. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan perbandingan antara indeks yang diterima petani dan indeks pengeluaran petani. Untuk periode 2015-2019, sasaran angka NTP berkisar antara 101,21 hingga 104,56 yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluarannya.

## 6. Pendapatan per Kapita

Sebagai sasaran dalam periode 2015-2019, pendapatan per kapita sektor pertanian diharapkan mencapai 6,29% (PDB Total/Kapita) dan 5,77% (PDP Pertanian Sempit/TK Pertanian sempit)

Target Kinerja Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
- 2) Peningkatan Diversifikasi pangan (Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan/PPH pada tahun 2019 mencapai 92,5, dan Konsumsi kalori pada tahun 2019 mencapai 2.150 Kkal/Kapita/hari.
- 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama mencapai 10% pada tahun 2019 dari capaian 8% pada tahun 2014, dan pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor dari 7% pada tahun 2014 mencapai -1,0% pada tahun 2019, juga peningkatan produk cabe besar, cabe rawit, bawang merah, manga, nenas, manggis, salak kentang, jeruk siam, karet, kopi, kakao, lada, pala, cengkih, kelapa dan teh.
- 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan dan bioenergy dengan dengan produksi kelapa sawit/CPO dengan pertumbuhan 4,4%/tahun dan produksi ubu kayu dengan tingkat pertumbuhan 1,7%/tahun.
- 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani dengan tingkat pertumbuhan PDB Pertanian sempit/TK Pertanian sebesar 4,3%/tahun, dan tingkat kemiskinan di pedesaan pada tahun 2019 mencapai 14,4 juta orang atau berkurang 3,4%/tahun.

- 6) Akuntabilitas kinerja aparaturn pemerintah yang baik dengan opini laporan keuangan kementerian dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Dalam menjalankan pembangunan pertanian dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak bias hanya berasal dari APBN, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah daerah melalui APBD provinsi dan/kabupaten, keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan investasi asing, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah : ***Terwujudnya sistem Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tangguh, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.***

Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

1. Mengembangkan teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mendukung pada peningkatan produksi dan mutu hasil Pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan.
2. Pengembangan agribisnis komoditas unggulan yang sesuai kawasan dan agroklimat dengan mewujudkan iklim usaha pertanian yang kondusif
3. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya Pertanian dan Ketahanan Pangan berbasis lokal
4. Penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan pertanian.

5. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan berbasis lokal melalui pertanian modern yang berwawasan lingkungan

### **3.2.1. Tujuan Renja OPD**

Tujuan dari ditetapkannya Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatkan diseminasi dan penerapan teknologi dan inovasi Pertanian
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian.
3. Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian.
4. Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.
6. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penganeekaragaman pangan dan optimalisasi lahan.
7. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
8. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian;

### **3.2.2. Sasaran Renja OPD**

1. Meningkatnya diseminasi dan penerapan teknologi dan inovasi Pertanian
2. Meningkatnya kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian.
3. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian.
4. Meningkatnya Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.
6. Meningkatnya ketahanan pangan daerah melalui penganeekaragaman pangan dan optimalisasi lahan.
7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu.
8. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tersebut di atas, maka perlu ditetapkan strategi dan kebijakan umum antara lain sebagai berikut :

## **1) Strategi**

- a. Peningkatan diseminasi dan penerapan teknologi dan inovasi Pertanian
- b. Peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian.
- c. Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pertanian.
- d. Peningkatan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian.
- f. Peningkatan ketahanan pangan daerah dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan
- g. Peningkatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu.
- h. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian;

## **2) Kebijakan umum**

- a. Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
- b. Mengembangkan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
- c. Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah;
- d. Mengembangkan Pertanian yang Berwawasan Lingkungan.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.
- f. Penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian perkebunan dan kehutanan adalah sebagai seperti yang terlihat pada tabel tabel 3.1.

## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Temanggung serta Target dan Sasaran Pembangunan yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung merupakan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Temanggung, 14 Juni 2017

**KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Ir. C.MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198703 1 006